

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN HOSNI MUBARAK TURUN DARI KURSI KEPRESIDENNYA (2011)

Femi Fernando Dan Syafri Harto

Abstract

This research aims to find large power in Egypt that has brought an end to Hosni Mubarak's leadership has led the country for 30 years. Since Hosni Mubarak of Egypt has served as president in 1980, he has brought Egypt to the State which has an important role in the Middle East. Mubarak is also considered as a liaison figure between the Arab countries with the West in various conflicts in the Middle East. Mubarak has good relations with western countries, especially the United States. Mubarak success in international politics is not matched its success as a leader in the country. Various problems arise due to poor government's role in the welfare of its people. Problems of poverty, unemployment, human rights abuses and political problems that occur is getting worse and cause anger and resentment of the people more peaked. On January 25, 2011, thousands of Egyptians doing demonstrations demanding Mubarak step down. This action begins 18 days of demonstrations demanding the end of Mubarak regime. Action of millions of Egyptians can not be stopped because of the support from within and outside the country who continue to urge Mubarak resign. The great strength of millions of Egyptians into evidence that people of power are able to defeat the great power of the authoritarian leader. On February 11, 2011, Hosni Mubarak officially resigned as president of Egypt. To control the vacuum in the government, all authority Mubarak handed over to the Egyptian Military Council. Egypt's Supreme Council of the Armed Forces released a declaration stating that the number three will replace the Military Council government positions that are not supported by the people of Egypt.

Keywords: Mesir, Hosni Mubarak, Revolution, People of Power.

Pendahuluan

Mubarak sebagai pemimpin tunggal di Mesir, mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden Mesir menuju ke pemilu multikandidat pada akhir Februari 2005. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih langsung pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu pada saat itu.¹ Salah satu kandidat Presiden saat itu, Ayman Nour dari partai Al-Ghad mengkritik jalannya pemilu yang penuh kecurangan. Ayman Nour mengatakan aturan dan tekanan terhadap rakyat Mesir yang dilakukan Mubarak membuat kandidat lainnya tidak bias bersaing. Mubarak pun menjadi Presiden Mesir selama 5 periode sejak tahun 1981.

¹ J. Sitohang, S. Dam, dan A.R. Rahman. *Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir, dan Afrika Selatan*. Jakarta. 2001. P2P-LIPI. 64.

Di samping keberhasilan Mubarak memimpin Mesir di masa lalu, sisi gelap kepemimpinannya pada tahun belakangan mulai mengemuka. Pemerintahannya disebut marak oleh korupsi. Mubarak disebut mendorong kementerian dalam negeri dan pihak intelijen mengambil uang rakyat melalui perusahaan konstruksi dan jasa milik keluarganya, dan keuntungannya diberikan kepada pejabat di kementerian dan agen intelijen tersebut. Bahkan kantor berita Rusia, Pravda, menyebut bahwa pemerintahan Mubarak telah menjual beberapa aset atau perusahaan sektor publik Mesir kepada para pengusaha yang bekerja pada putranya Gamal Mubarak, atau kepada perusahaan asing.²

Di bidang politik, menjunjung atas nama kestabilan, Mubarak disebut cenderung mengadakan penindasan politik. Mubarak memberlakukan Undang-undang Keadaan Darurat sejak berakhirnya Perang Enam Hari pada 1967, yang memperbesar kekuasaan polisi, menanggukkan hak konstitusional warga negara. Di bawah hukum ini pemerintah Mesir berhak menahan warga negaranya tanpa alasan jelas dan dalam jangka waktu tak terbatas. Sepanjang pemerintahannya, rezim Mubarak memberlakukan UU itu, dengan alasan untuk melawan terorisme sekaligus mengontrol kelompok-kelompok Islam fundamentalis, termasuk Ikhwanul Muslimin. Mubarak beralasan, tanpa UU itu, Ikhwanul Muslimin dapat naik ke tampuk pemerintahan dan menggoyahkan kestabilan politik Mesir. Organisasi Hak Azasi Manusia Mesir menuduh Mubarak menahan sekitar 4.000 orang tanpa alasan jelas, dan sekitar 1.000 diantaranya adalah anggota Ikhwanul Muslimin, tanpa ada proses peradilan dan dituduh melakukan kejahatan politik.³

Selain tekanan di bidang politik terhadap kelompok oposisi, di bidang ekonomi juga Mubarak memimpin sebuah periode stabilitas dalam negeri dengan kediktatorannya, dan memonopoli ekonomi Mesir. Korupsi yang kian parah menyebabkan ketidak-stabilan di bidang ekonomi Mesir. Menurut data IMF, pertumbuhan PDB per kapita Mesir berjalan stagnan dari tahun 1989 hingga 2008, rata-rata PDB per kapita Mesir sedikit berubah, dari 2.155 dolar AS pada tahun 1989 menjadi 2.160 dolar AS pada tahun 2008. Ini merupakan yang terburuk di antara tiga belas negara di Timur Tengah, Afrika Utara, dan negara-negara Teluk.⁴

Segala permasalahan yang menyebabkan ketidak-stabilan ekonomi di Mesir mengakibatkan harga bahan pangan yang terus meningkat, kemiskinan yang terus bertambah, lapangan pekerjaan yang minus. Semua permasalahan diperparah dengan tekanan dari rezim terhadap rakyat dimana kebebasan berekspresi yang dikekang sedemikian rupa, kepastian hukum yang buruk. Hal ini telah meledakkan kesabaran rakyat Mesir selama 30 tahun kepemimpinan Mubarak. Rezim otoriter dan represif ini telah mengakumulasi kebencian jutaan rakyat Mesir terhadap sang presiden mereka sendiri.

Dengan semangat persatuan melawan penguasa yang otoriter dan diktator, sebagian besar warga Mesir menyatakan tekad untuk menumbangkan rezim Mubarak yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, sehingga mereka turun ke jalanan demi perjuangan melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Itulah sebabnya, seluruh warga Mesir mulai bergabung dengan aksi massa dalam sebuah demonstrasi.

² David Held. *Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Pusat Pelajar. Jakarta, 2004. Hal 167.

³ Historia. *Mesir di tangan Mubarak*. <http://www.majalah-historia.com/berita-418-mesir-di-tangan-mubarak.html>

⁴ Bataviase. *Ekonomi, Inti Masalah Mesir*. <http://bataviase.co.id/node/559673>

Kemuakan ini kemudian disulut oleh kudeta rakyat Tunisia terhadap sang presidennya sendiri, Ben Ali. Terinspirasi terhadap fenomena di Tunisia itu, rakyat Mesir secara simultan merasa terberanian untuk menggulingkan pemerintahannya yang juga diktator seperti negara Tunisia. Rakyat Mesir-pun menjadi yakin dengan *people power* (kekuatan rakyat) dan mampu menggulingkan pemerintahan yang otoriter.⁵

Krisis yang berlangsung selama beberapa hari tanpa ada kepastian masa depan Mesir, membuat pemerintah AS turun tangan mengatasinya. Intervensi AS terhadap permasalahan di Mesir dikarenakan AS mempunyai kepentingan terhadap Mesir dan Timur Tengah. Mesir merupakan penghubung kepentingan AS di Timur Tengah, termasuk hubungan dengan Israel. Kebijakan Mubarak yang terlihat lebih pro-Israel dalam konflik Israel dengan Palestina tak lepas dari peran dan pengaruh AS terhadap pemerintah Mesir. Pada tanggal 28 Januari 2011, Presiden AS, Barak Obama meminta Mubarak untuk segera mengambil kebijakan kongkret guna merealisasikan reformasi politik dan menghentikan tindak kekerasan terhadap para demonstran. Dengan menjaga posisi Mubarak dan kepentingannya terhadap Mesir, kebijakan AS selalu mengatas-namakan demokrasi dan menjunjung HAM. Atas desakan AS, dalam pidatonya yang disiarkan di televisi, Mubarak pun membubarkan kabinetnya dan membentuk pemerintahan baru.⁶

Akhirnya, pada hari jumat tanggal 11 Februari 2011, secara mengejutkan Omar Suleiman mengumumkan pengunduran diri Mubarak dari kekuasaan yang telah dikuasainya selama 30 tahun di Mesir. Untuk mengontrol kekosongan dalam pemerintahan, seluruh wewenang Mubarak diserahkan kepada Dewan Militer Mesir. Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata Mesir merilis deklarasi nomor tiga yang menyebutkan bahwa Dewan Militer akan menggantikan jabatan pemerintahan yang tidak didukung oleh rakyat Mesir.

Keberhasilan revolusi rakyat Mesir tak lepas dari peran keberhasilan dan keberanian rakyat Tunisia menggulingkan pemimpinnya, Ben Ali. Revolusi Tunisia menyulut keberanian jutaan rakyat Mesir untuk melakukan hal yang sama. Rakyat tidak merasa sedikitpun gentar meski dapat tekanan dari pemerintah selama berlangsungnya demonstrasi. Keberhasilan perjuangan rakyat Mesir yang melakukan demo selama 18 hari disambut kegembiraan rakyat Mesir di dalam maupun luar negeri.⁷

Bentuk Keberhasilan Demokrasi

Protes yang terjadi di Mesir terinspirasi oleh revolusi yang berhasil di Tunisia. Ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes pemerintah atas masalah kemiskinan, pengangguran yang merajalela, korupsi di pemerintahan dan kepemimpinan otoriter dari Presiden Hosni Mubarak yang telah memerintah Mesir selama tiga puluh tahun. Ini adalah protes pertama dengan skala besar sejak tahun 1970-an. Sebagai bentuk protes pada pemerintah, pemenang nobel dan mantan kepala Badan Tenaga Atom Internasional, Mohamed El-Baradei kembali ke Mesir dari Wina, menyatakan bahwa ia bersiap memimpin

⁵ HMInews. *Kronologi Revolusi Mesir*. <http://hminews.com/news/inilah-kronologi-18-hari-revolusi-mesir-mubarak-tumbang/>

⁶ DetikNews. *Mubarak Amankan Kepentingan AS*. <http://www.detiknews.com/read/2011/02/04/051138/1559803/10/mubarak-tak-segera-mundur-karena-amankan-kepentingan-as>

⁷ Wikipedia. *Revolusi Mesir 2011*. http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Mesir_2011

dan bergabung dengan pemrotes. Demikian pula dengan Ikhwanul Muslimin, lawan politik dari rezim Mubarak yang selama ini secara resmi dilarang pemerintahan Mubarak, banyak dari mereka masih muda turut serta.

Terjadi kemarahan besar pendemo dimana pemerintah Mesir memblokir semua layanan internet dan komunikasi publik, termasuk akun Twitter dan facebook, e-mail dan outlet jejaring sosial bahkan pesan teks juga diblokir. Namun pendemo dan wartawan mulai menemukan cara-cara alternatif untuk mendapatkan jaringan online dan mendorong keluarnya informasi.

Seorang ahli analisis tentang demokrasi, Robert A. Dahl, di mana kehidupan demokrasi tidak cukup digerakkan dengan prosedur atau metode semata. Demokrasi, dalam pandangan Robert A.Dahl mesti mengandung dua dimensi terbaik dalam hal kontestasi dan partisipasi. Tatanan politik yang terbaik bagi masyarakat bukanlah demokrasi semata melainkan polyarchy. Tipologi system politik menurut Robert A.Dahl ditentukan dari bekerjanya kompetisi dan partisipasi dalam kehidupan politik.⁸

Menurut Dahl, system yang demokratis (polyarchy) memiliki 7 indikator, yaitu:

1. Setiap warga negara memiliki persamaan hak dalam memilih pemimpin.
2. Setiap warga negara mempunyai persamaan hak dipilih dalam pemilu.
3. Pemilihan pejabat publik diselenggarakan melalui pemilu yang teratur, adil, dan bebas.
4. Kontrol kebijakan dilakukan oleh pejabat publik terpilih.
5. Jaminan kebebasan dasar dan politik
6. Adanya saluran informasi alternatif yang tidak dimonopoli pemerintah atau kelompok tertentu.
7. Adanya jaminan membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.

Menurut Dahl, syarat terbentuknya sistem demokrasi (polyarchy) yang ideal meliputi 5 hal, yaitu:

1. Persamaan hak pilih.
2. partisipasi efektif.
3. Pembesaran kebenaran.
4. Kontrol terhadap agenda yang dilakukan oleh masyarakat.
5. Pencakupan masyarakat hukum adalah orang dewasa.

Situasi yang terjadi di Mesir membutuhkan penyelesaian yang damai menuju demokrasi yang sebenarnya. Ini diperlukan untuk menghindari perubahan yang mendadak serta adanya kekerasan yang dapat merusak aspirasi masyarakat Mesir. Oleh sebab itu, Dewan Militer mengambil alih kepemimpinan di Mesir dengan membubarkan parlemen, membekukan konstitusi, dan menjangkan sebuah pemilihan umum. Dewan Militer

⁸ Robert A.Dahl. *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Diterjemah oleh A.Rahman Zainudin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2001. Hal.173.

menyatakan prioritas utamanya untuk mengembalikan stabilitas dan demokrasi di Mesir. Sementara itu, rakyat menyikapi tindakan Dewan Militer itu dengan waspada.⁹

Sejak Mubarak turun, siapapun menjadi bebas mengeluarkan pendapat. Rakyat Mesir menyerukan martabat kebebasan dan demokrasi di Mesir. Seruan itu berdasar dari tuntutan rakyat yang menginginkan Hosni Mubarak turun dari kekuasaannya dan tidak ada pengalihan kekuasaan kepada anaknya, Gamal Mubarak. Selain itu, rakyat menginginkan konstitusi ditulis ulang untuk menetapkan batasan masa jabatan presiden, agar tidak ada lagi rezim serupa di masa yang akan datang di Mesir. Kemudian rakyat menginginkan pemilu yang bebas dan adil serta membentuk parlemen baru.

Peran Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin adalah salah satu kelompok dari umat Islam, mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Islam untuk hidup di bawah naungan Islam. Jamaah atau kelompok Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir, pada Maret 1928 dengan pendirinya yaitu Hassan Al-Banna. Pada tahun 1930, Anggaran Dasar Ikhwanul Muslimin dibentuk dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul Muslimin tanggal 24 September 1930, dan membuka cabang di kota Suez, Abu Soweir dan al-Mahmoudiya. Pada tanggal 12 Februari 1949, pendiri Ikhwanul Muslimin, Hassan Al-Banna meninggal dunia karena dibunuh, dan kepemimpinan Ikhwanul Muslimin diganti oleh Hasan Al-Hudhaibi pada tahun 1950.

Awalnya Ikhwanul Muslimin menghindari keterlibatan dalam aksi protes terbuka yang dilakukan rakyat Mesir. Selama kepemimpinan Mubarak, Ikhwanul Muslimin selalu mendapat tekanan dari pemerintah Mesir, banyak anggota Ikhwanul Muslimin yang ditangkap dan dipenjara akibat kritik pada pemerintah. Namun semangat anti-pemerintahan besar atas desakan dari jalan yang begitu besar dan pemerintah Mesir tampak berada dalam kesulitan. Karenanya, kaum Ikhwanul Muslimin pun bergabung mendukung perjuangan rakyat yang besar itu. Bersama rakyat dan demonstran, Ikhwanul Muslimin menyatakan Mubarak sebagai musuh bersama. Mereka yang ikut dalam aksi protes di berbagai kota, mengalami jatuhnya korban. Dalam bentrokan di Aleksandria, misalnya, banyak anggota Ikhwanul Muslimin yang menjadi korban.

Ikhwanul Muslimin bergerak sangat hati-hati dalam revolusi menggoyang kekuasaan Hosni Mubarak. Ikhwanul Muslimin selalu menjadi sasaran empuk konflik politik dengan pemerintah selama 30 tahun kepemimpinan Hosni Mubarak. Pada awal demonstrasi, Ikhwanul Muslimin dituding bertanggung-jawab oleh pemerintah Mesir, meski para pemimpinnya berterus terang bahwa mereka hanya memainkan peranan kecil dalam menggerakkan revolusi Mesir.

Peran Ikhwanul Muslimin terlihat ketika ikut andil saat perundingan dengan pemerintah tanggal 6 Februari 2011, yang juga diikuti oposisi independen lainnya seperti Mohammad El-Baradei. Ini merupakan perundingan pertama Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah sejak 50 tahun lalu. Dalam perundingan itu Ikhwanul Muslimin secara tegas menolak usulan pemerintah yang menginginkan kelompok oposisi menjadi bagian dari badan

⁹ Apriadi Tamburaka. *Revolusi Timur Tengah*. Jakarta. Narasi: 102.

pengawasan reformasi menjelang masa jabatan Mubarak berakhir bulan September 2011. Ikhwanul Muslimin yang dipimpin tokoh seniornya yaitu Essam Al-Erian, menegaskan tuntutan yang juga merupakan tuntutan rakyat Mesir yang menginginkan turunnya Mubarak dari jabatannya.

Sebelumnya juga pada tanggal 25 Januari 2011, Ikhwanul Muslimin menggelar aksi demonstrasi untuk memprotes pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian saat aksi massa di kantor Kementerian Dalam Negeri yang menewaskan seorang anggota Ikhwanul Muslimin. Tuntutan itu diperluas menjadi tuntutan pengunduran diri Menteri Dalam Negeri, pemulihan upah minimum yang adil, mengakhiri UU Darurat dan pembatasan masa jabatan presiden hanya untuk dua periode.

Hasil dan Pembahasan

Sejak masa pemerintahan Mubarak, rakyat Mesir mengalami tekanan dan kekangan dalam bertindak dengan otoritas penuh Mubarak sebagai seorang pemimpin, diperparah dengan makin tingginya tingkat korupsi di pemerintahan yang dilakukan demi kepentingan pribadi maupun golongannya. Dengan kian merajalelanya korupsi di pemerintahan Husni Mubarak, maka tingkat kesejahteraan rakyat yang berada di luar lingkaran kekuasaan dalam rezim Mubarak sangat rendah, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di Mesir sangat tinggi.¹⁰

Keresahan dan prustasi sosial di Mesir terhadap tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang terus membengkak tak lagi dipahami rezim Mubarak, padahal itu merupakan bentuk dari kegagalan Mubarak dalam menciptakan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat Mesir. Kebijakan pasar bebas dan ideologi neoliberal yang dianut rezim Mubarak merupakan bencana bagi rakyat Mesir, menyebabkan ketahanan ekonomi Mesir menjadi kian rapuh, karena Mubarak dan semua pengikutnya yang duduk di pemerintahan lebih mendengar AS dan Israel dari pada rakyat Mesir itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa dua negara ini mempunyai kepentingan sendiri terhadap Mesir untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah Arab, yang berarti kebijakan negara mereka nyatanya tidak pernah menginginkan kebangkitan nasionalisme bangsa Arab untuk tumbuh di Mesir.

Tekad rakyat Mesir untuk menjatuhkan Mubarak kian besar mengingat kepemimpinan Mubarak dikenal penuh dengan dugaan korupsi, penyalahgunaan dana publik, dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan sendiri. Mubarak disebut mendorong kementerian dalam negeri dan pihak intelijen mengambil uang rakyat melalui perusahaan konstruksi dan jasa milik keluarganya, dan keuntungannya diberikan kepada pejabat di kementerian dan agen intelijen tersebut. Bahkan kantor berita Rusia, Pravda, menyebut bahwa pemerintahan Mubarak telah menjual beberapa aset atau perusahaan sektor publik Mesir kepada para pengusaha yang bekerja pada putranya Gamal Mubarak, atau kepada perusahaan asing.

Selain itu, sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Mesir juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan revolusi di Mesir. AS menuntut pimpinan Mesir untuk segera

¹⁰ Jurnal Irish Kiseki. *Kepemimpinan Husni Mubarak*.
http://vibizmanagement.com/journal/index/category/leadership_corp_culture/266/20

mewujudkan langkah reformasi yang konkrit. Wakil Presiden Mesir, Omar Suleiman telah berjanji akan meneruskan reformasi, setelah pengumuman Mubarak bahwa dia akan melepaskan jabatannya September mendatang. Tapi pemerintah Amerika Serikat berpendapat, Suleiman dan kabinetnya lambat dan terkesan tidak melakukannya.

Demonstrasi dan krisis yang berlangsung selama beberapa hari tanpa ada kepastian masa depan Mesir, membuat pemerintah AS turun tangan mengatasinya. Intervensi AS terhadap permasalahan di Mesir dikarenakan AS mempunyai kepentingan terhadap Mesir dan Timur Tengah. Mesir merupakan penghubung kepentingan AS di Timur Tengah, termasuk hubungan dengan Israel. Kebijakan Mubarak yang terlihat lebih pro-Israel dalam konflik Israel dengan Palestina tak lepas dari peran dan pengaruh AS terhadap pemerintah Mesir. Pada tanggal 28 Januari 2011, Presiden AS, Barak Obama meminta Mubarak untuk segera mengambil kebijakan kongkret guna merealisasikan reformasi politik dan menghentikan tindak kekerasan terhadap para demonstran. Dengan menjaga posisi Mubarak dan kepentingannya terhadap Mesir, kebijakan AS selalu mengatas-namakan demokrasi dan menjunjung HAM. Atas desakan AS, dalam pidatonya yang disiarkan di televisi, Mubarak pun membubarkan kabinetnya dan membentuk pemerintahan baru dalam mempertahankan kedudukannya dan mendapatkan perhatian baik dari rakyatnya.

AS juga mempunyai beberapa tuntutan terhadap pemerintah Mesir, seperti proses transisi politik termasuk dihentikannya penangkapan demonstran dan jurnalis, diakhirinya pemberlakuan undang-undang darurat, diadakannya dialog yang berbeda dengan semua kalangan masyarakat. Peran AS memang semakin kelihatan ketika Gedung Putih menyatakan bahwa mereka mengamati dengan seksama aksi protes di Mesir, dan menekankan dukungan pemerintah AS atas hak-hak rakyat Mesir dalam berkumpul dan mengungkapkan pendapat.¹¹

Para pengamat memperkirakan, kejatuhan Hosni Mubarak saat ini sulit dihindari, karena ini adalah demonstrasi yang sangat besar yang pernah terjadi di Mesir, ditambah lagi peran Amerika Serikat yang selalu mengatas-namakan demokrasi untuk menekan kedudukan Mubarak agar mundur. Perhatian masyarakat dunia saat ini sedang mengarah kepada peta perpolitikan di Mesir.

Oleh karena itu, Ikhwanul Muslimin yang merupakan gerakan oposisi terbesar dan paling terorganisasi di Mesir, dan partai liberal Wafd (partai oposisi tertua negara itu) secara tidak resmi juga mendukung protes jalanan, dengan menyatakan bahwa anggota mereka akan ambil bagian dalam aksi ini. Hal ini dilakukan agar berakhirnya rezim yang saat ini membuat rakyat Mesir menderita kekurangan pangan dan krisis ekonomi berkepanjangan. Gerakan revolusi politik yang melanda Mesir tidak saja bertujuan menumbangkan rezim Mubarak yang berkuasa selama kurang lebih 30 tahun, melainkan juga sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kepedulian bagi warga Mesir yang menghendaki perubahan di semua lini kehidupan, termasuk menghapus rezim otoriter maupun dinasti politik yang sudah lama mewarnai dinamika pemerintahan bangsa Mesir.

Aksi masa yang dilakukan oleh rakyat Mesir telah banyak berjatuhan korban akibat bentrokan dengan polisi, namun tekad rakyat yang kuat untuk mengakhiri rezim Mubarak tidak menyurutkan keberanian mereka. Korban yang terus bertambah dari pihak anti

¹¹ WaspadaNews. *Menunggu Sikap militer Mesir dan AS*.
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=174681:menunggu-sikap-militer-mesir-dan-as&catid=27:tajuk-rencana&Itemid=102

pemerintahan, pembangkangan terhadap seruan militer dan polisi agar pengunjuk rasa mundur dan pengabaian terhadap jam malam yang ditetapkan pemerintah merupakan indikator bahwa unjuk rasa anti pemerintah yang digelar di beberapa kota di Mesir merupakan kekuatan rakyat (people power) yang mengarah ke revolusi untuk menumbangkan rezim berkuasa di Mesir.¹²

Kesimpulan

Peran besar Mesir di Timur Tengah tak lepas dari sosok pemimpin yang telah 30 tahun memimpin negara itu hingga memiliki hubungan yang kuat dengan AS. Husni Mubarak menjadi tokoh yang penting yang selalu terlibat dalam setiap permasalahan yang terjadi di Timur Tengah. Sosoknya mulai dikenal saat ia berperan besar dalam militer Mesir, dapat dukungan dari rakyatnya untuk memimpin Mesir dan pada akhirnya dijatuhkan juga oleh kekuatannya rakyatnya sendiri.

Segala permasalahan yang menyebabkan ketidak-stabilan ekonomi di Mesir mengakibatkan harga bahan pangan yang terus meningkat, kemiskinan yang terus bertambah, lapangan pekerjaan yang minus. Semua permasalahan diperparah dengan tekanan dari rezim terhadap rakyat dimana kebebasan berekspresi yang dikekang sedemikian rupa, kepastian hukum yang buruk. Hal ini telah meledakkan kesabaran rakyat Mesir selama 30 tahun kepemimpinan Mubarak. Rezim otoriter dan represif ini telah mengakumulasi kebencian jutaan rakyat Mesir terhadap sang presiden mereka sendiri.

Sejarah baru juga tercipta bagi rakyat Mesir dimana rakyat Mesir membuktikan bahwa kekuatan rakyat jauh lebih kuat dari kekuasaan pemimpin diktator seperti Hosni Mubarak. Rakyat Mesir juga membuktikan bahwa kepentingan rakyat jauh lebih penting dari apapun bagi siapapun yang memimpin sebuah bangsa. Di saat rakyat tidak lagi mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan bagi kehidupannya, itu membuktikan bahwa seorang pemimpin harus mempertanggung-jawabkan kebijakannya terhadap jutaan rakyat. Pengunduran diri Mubarak bukan suatu akhiran yang baik pada kondisi dalam negeri Mesir, tapi merupakan awal yang baik bagi Mesir untuk memulai pencapaian tatanan yang jauh lebih mendukung segala kepentingan rakyat.

Semua ini sangat tergantung pada kelancaran proses transisi politik dari militer ke sipil. Pasca turunnya Mubarak, inilah revolusi yang sebenarnya bagi rakyat Mesir. Rakyat Mesir akan dihadapkan pada perubahan yang bukan hanya menyangkut dalam negerinya, tapi juga negara sekitarnya dan dunia. Dengan posisi geopolitisnya yang strategis, Mesir mengemban amanat besar.

¹² BorneoTribun. *Aliran Realisme, Keseimbangan Strategis dan People Power Di Mesir*.
<http://www.borneotribune.com/headline/aliran-realisme-keseimbangan-strategis-dan-people-power-di-mesir.html>

Referensi

- Apriadi Tamburaka. *Revolusi Timur Tengah*. Jakarta. Narasi: 102.
- Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Politik*. Media Pressindo. 2005. Hal 93.
- David Held. *Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Pusat Pelajar. 2004. Hal 167.
- David Ricardo. *Revolusi Mesir Revolusi Rakyat*. Makassar. Arus Timur: 44.
- J.Sitohang, S.Dam & AR.Rahman. *Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan*. P2P-LIPI. Jakarta, 2001. Hal 64.
- Larry Diamond & Mare F.Plattner. *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Diterjemahkan oleh Tri Wibowo. RGP. Jakarta, 2000. Hal 19.
- Mohtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES: 187.
- Robert A.Dahl. *Analisa Politik Modern*. Diterjemahkan oleh Bayu Suryaningrat. Dewaruci. 1980. Hal 15.
- Robert A.Dahl. *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Diterjemahkan oleh A.Rahman Zainudin. YOI. Jakarta, 2001. Hal 173.
- Sri Hayati. *Geografi Politik*. Rafika Aditama. Bandung, 2007. Hal 42.
- Bataviase. *Ekonomi, Inti Masalah Mesir*. <http://bataviase.co.id/node/559673>
- BorneoTribun. *Aliran Realisme, Keseimbangan Strategis dan People Power Di Mesir*. <http://www.borneotribune.com/headline/aliran-realisme-keseimbangan-strategis-dan-people-power-di-mesir.html>
- DetikNews. *Mubarak Amankan Kepentingan AS*. <http://www.detiknews.com/read/2011/02/04/051138/1559803/10/mubarak-tak-segera-mundur-karena-amankan-kepentingan-as>
- Historia. *Mesir di tangan Mubarak*. <http://www.majalah-historia.com/berita-418-mesir-di-tangan-mubarak.html>
- HMInews. *Kronologi Revolusi Mesir*. <http://hminews.com/news/inilah-kronologi-18-hari-revolusi-mesir-mubarak-tumbang/>

Irish Kiseki. *Kepemimpinan Husni Mubarak*. http://vibizmanagement.com/journal/index/category/leadership_corp_culture/266/20

Wikipedia. *Revolusi Mesir 2011*. http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Mesir_2011